

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Tingkat Kekayaan Daerah

2.1.1.1 Pengertian Tingkat Kekayaan Daerah

Kekayaan daerah dapat diartikan sebagai kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan daerahnya. Menurut Safitri et al. (2022) tingkat kekayaan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Pernyataan tersebut selaras dengan pendapat Salsabilla & Rahayu (2021) menjelaskan bahwa tingkat kekayaan daerah mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam memaksimalkan potensi sumber penerimaan daerah.

Menurut Putri & Arza (2019) kekayaan daerah adalah tingkat kemakmuran daerah yang tercermin dari jumlah Pendapatan Asli Daerah. Sejalan dengan pendapat Hardiningsih et al. (2019) menjelaskan bahwa kekayaan daerah merupakan tingkat kemakmuran daerah yang terlihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 merupakan pendapatan daerah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kekayaan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah

dalam membiayai kebutuhan daerah dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh daerah menjadi sumber pendapatan daerah. Kekayaan daerah diprosikan dengan Pendapatan Asli Daerah. Meningkatnya pendapatan asli daerah akan mencerminkan kemakmuran/kekayaan suatu daerah. Kekayaan daerah tersebut kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan layanan masyarakat yang lebih baik.

2.1.1.2 Pengukuran Tingkat Kekayaan Daerah

Kekayaan suatu negara dapat diukur dengan berbagai cara, namun cara yang digunakan akan berbeda-beda tergantung pada pandangan negara tersebut (Jessica & Suhartono, 2020). Kekayaan daerah tercermin dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini sesuai dengan pendapat Hardiningsih et al. (2019), Wijayanti & Suryandari (2020) dan Indaryani & Rahayu (2023) bahwa tingkat kekayaan daerah diprosikan dengan Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan modal dasar bagi setiap daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan sekaligus bukti dukungan masyarakat terhadap pemerintah dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (Nurjaya, 2023).

Menurut Damar et al. (2020:46) tingkat kekayaan daerah dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Kekayaan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

2.1.1.3 Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim & Kusufi (2013:101) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah seluruh pendapatan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 1 Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun menurut Kamaroellah (2021:215) Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh daerah yang hasilnya digunakan untuk mendanai pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya secara tidak langsung diberikan, sedangkan pelaksanaannya dapat dipaksakan.

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah diperoleh dari orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, kemudian pajak tersebut menjadi sumber pendapatan setiap daerah yang akan digunakan oleh masing-masing daerah untuk keperluan daerahnya.

b. Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi/badan.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah pendapatan yang telah diatur dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Hafandi & Romandhon (2020) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan laba yang diperoleh dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pendapatan yang dihasilkan melalui kerjasama dengan pihak ketiga.

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi.

a. Transfer Pemerintah Pusat

1) Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan pendanaan dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Besaran dana perimbangan ditetapkan setiap tahun dalam APBN dan alokasi kepada daerah telah ditetapkan dengan peraturan presiden mengenai rincian APBN. Dana perimbangan tersebut terdiri dari.

a) Dana Transfer Umum

Dana Transfer umum merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan ketentuan kewenangan daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Transfer umum terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

b) Dana Transfer Khusus

Dana transfer khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN kemudian dialokasikan ke berbagai daerah untuk mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik. Dana transfer khusus dikenal juga dengan istilah Dana Alokasi Khusus (DAK).

2) Dana Insentif Daerah

Dana insentif daerah merupakan dana yang bersumber dari APBN yang kemudian dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria

tertentu dan dimaksudkan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.

3) Dana Otonomi Khusus

Dana otonomi khusus merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah yang memiliki otonomi khusus.

4) Dana Keistimewaan

Dana keistimewaan merupakan dana yang berasal dari APBN kemudian digunakan untuk membiayai kewenangan istimewa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

5) Dana Desa

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan untuk desa melalui APBD Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

b. Transfer antar-Daerah

1) Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari APBN yang kemudian dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dan digunakan untuk kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya.

3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah semua pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

2.1.2 Kompleksitas Pemerintah Daerah

2.1.2.1 Pengertian Kompleksitas Pemerintah Daerah

Kata “Kompleksitas” berasal dari bahasa lain yaitu *complexice* yang berarti totalitas atau keseluruhan, sebuah ilmu yang mengkaji totalitas sistem dinamik secara keseluruhan. Kompleksitas pemerintah daerah dapat diartikan sebagai keadaan dimana berbagai faktor dengan karakteristik yang berbeda-beda mempengaruhi pemerintahan secara langsung maupun tidak langsung (Jauhari et al., 2020).

Adapun menurut Andesti & Agustin (2022), Kompleksitas pemerintahan daerah dapat diartikan sebagai situasi yang memengaruhi cara pemerintah daerah beroperasi karena adanya berbagai faktor dan karakteristik yang beragam pada daerah tersebut.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kompleksitas pemerintah daerah merupakan keadaan dengan karakteristik yang berbeda-beda mempengaruhi pemerintah secara langsung maupun tidak langsung.

2.1.2.2 Pengukuran Kompleksitas Pemerintah Daerah

Kompleksitas pemerintah daerah dapat dilihat dari beberapa aspek. Dalam mengukur kompleksitas pemerintah daerah, Penelitian Priyono et al. (2018) menggunakan Jumlah SKPD, Ukuran Legislatif dan Jumlah Penduduk. Berdasarkan pengukuran dari aspek tersebut, kompleksitas pemerintah daerah dapat diukur dengan cara sebagai berikut:

- a) Jumlah SKPD

$$\text{Kompleksitas Pemerintah Daerah} = \text{Jumlah SKPD}$$

- b) Ukuran Legislatif

$$\text{Kompleksitas Pemerintah Daerah} = \text{Ukuran Legislatif}$$

- c) Jumlah Penduduk

$$\text{Kompleksitas Pemerintah Daerah} = \text{Jumlah Penduduk}$$

Penelitian ini menggunakan penggabungan tiga indikator yaitu Jumlah SKPD, Ukuran Legislatif dan Jumlah Penduduk. Jumlah SKPD menggambarkan diferensiasi fungsional pada pemerintah di Indonesia. SKPD merupakan instansi daerah yang memiliki kewenangan dalam mengawasi keuangan daerah khususnya kewenangan dalam penggunaan anggaran. Semakin banyak jumlah SKPD diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang baik sehingga dapat menghasilkan kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik (Rofiq & Arza, 2021).

Lembaga legislatif memiliki peran yang strategis terhadap pengawasan keuangan daerah. Lembaga legislatif harus mengawasi mengenai pengeluaran dan pemasukan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang melakukan pengeluaran yang kecil dan pendapatan yang besar menggambarkan bahwa pemerintah daerah telah memiliki kinerja keuangan yang baik.

Jumlah penduduk merupakan jumlah manusia yang berdomisili pada suatu wilayah daerah dan memiliki mata pencaharian yang tetap serta telah tercatat secara sah berdasarkan peraturan yang berlaku di daerah tersebut (Rofiq & Arza, 2021). Semakin besar penduduk maka akan meningkatkan permintaan dan penawaran sehingga dapat meningkatkan perekonomian pada suatu daerah.

2.1.3 Kemandirian Keuangan Daerah

2.1.3.1 Pengertian Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Halim (2013:L-5) Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan yang diperlukan oleh daerah.

Kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai sendiri kegiatan pemerintahannya. kemandirian keuangan daerah tercermin dari besar kecilnya pendapatan asli daerah yang dibandingkan dengan pendapatan daerah dari sumber lain seperti bantuan pusat atau pinjaman pusat (Melmambessy, 2022).

Menurut Zakiah (2022), Kemandirian Keuangan daerah merupakan ukuran ketimpangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemandirian keuangan daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai kegiatan pemerintahan tanpa bergantung pada bantuan luar termasuk bantuan dari pemerintah pusat. Kemandirian Keuangan Daerah mencerminkan sejauh mana suatu daerah bergantung pada Pendapatan Transfer sebagai sumber pendanaan dari luar (Permatasari & Trisnaningsih, 2022).

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan tanpa bergantung pada sumber lain seperti bantuan pusat atau pinjaman pemerintah pusat.

Kemandirian daerah mendorong pemerintah daerah dalam menjalankan urusan daerah baik dalam urusan pemerintahan ataupun urusan pembangunan dengan mengandalkan keuangan daerah masing-masing berdasarkan asas otonomi daerah.

2.1.3.2 Pengukuran Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang telah membayar pajak daerah dan retribusi daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah diukur menggunakan Pendapatan Asli Daerah terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat, provinsi dan pinjaman. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dirumuskan oleh Halim & Kusufi (2013) sebagai berikut.

$$\text{Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{PAD}{\text{Bantuan Pusat, Provinsi dan Pinjaman}}$$

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menggambarkan ketergantungan suatu daerah terhadap sumber pendanaan dari luar. Rasio kemandirian yang tinggi menunjukkan bahwa daerah tidak terlalu bergantung pada sumber pendanaan dari luar (terutama pemerintah pusat dan provinsi) ataupun sebaliknya.

Rasio kemandirian suatu daerah yang tinggi menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah yang tinggi menunjukkan bahwa suatu daerah mampu menyelenggarakan desentralisasi fiskal dan berkurangnya tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat.

2.1.3.3 Pola Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel 2.1 Pola Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	>25-50	Konsultatif
Sedang	>50-75	Partisipatif
Tinggi	>75-100	Delegatif

Sumber: Halim (2014)

Menurut Halim (2014) menjelaskan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan otonomi daerah yang paling penting adalah hubungan pelaksanaan undang-undang tentang dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sebagai berikut.

1. Pola Hubungan Instruktif

Pola hubungan instruktif berarti bahwa peran pemerintah pusat lebih besar dibandingkan kemandirian pemerintah daerah (secara finansial daerah tidak dapat melaksanakan otonomi daerah).

2. Pola Hubungan Konsultatif

Pola hubungan konsultatif berarti bahwa campur tangan pemerintah pusat mulai berkurang dan konsultasi meningkat karena pemerintah daerah dianggap sedikit lebih mampu dalam melaksanakan otonomi daerah.

3. Pola Hubungan Partisipatif

Pola hubungan partisipatif berarti bahwa peran pemerintah pusat semakin berkurang dan tingkat kemandirian daerah otonom sudah mampu menyelenggarakan urusan otonominya. Peran pemerintah pusat bergeser dari konsultasi menjadi partisipasi.

4. Pola Hubungan Delegatif

Pola hubungan delegatif berarti bahwa sudah tidak ada lagi campur tangan dari pemerintah pusat karena daerah mempunyai kemampuan dan kemandirian dalam menjalankan otonomi daerah. Pemerintah pusat mempunyai keyakinan penuh kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

2.1.4 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

2.1.4.1 Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat suatu pencapaian pelaksanaan atas kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan,

misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi tujuan suatu organisasi (Mahsun, 2016:25). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa kinerja keuangan merupakan keluaran dari suatu program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang telah terukur.

Menurut Melmambessy (2022) menjelaskan bahwa kinerja merupakan kegiatan terukur dari suatu entitas yang menjadi salah satu ukuran yang digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah.

Kinerja keuangan merupakan pencapaian pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki selama periode tertentu, kemudian diukur dengan membandingkan hasil yang telah dicapai oleh pemerintah dari satu periode dengan periode lainnya untuk mengetahui kenaikan dan penurunan yang terjadi pada pemerintah daerah (Firsa et al., 2023). Adapun menurut Alfi & Sari (2023) Kinerja keuangan merupakan indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah telah mengumpulkan pendapatan yang dihasilkan dari wilayahnya sendiri dan upaya pemerintah dalam mengalokasikan pendapatan tersebut untuk pembangunan dan pelayanan publik dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah merupakan pencapaian pemerintah daerah sehubungan dengan penggunaan anggaran secara terukur untuk melihat kemampuan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

2.1.4.2 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Halim & Kusufi (2013: L-2-L3), tujuan dari pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah adalah sebagai tolok ukur dalam:

1. menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan otonomi daerah;
2. mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah;
3. mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerah;
4. mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan terhadap perolehan pendapatan daerah; dan
5. melihat pertumbuhan atau perkembangan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu.

Adapun menurut Mardiasmo (2016) tujuan pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah adalah untuk mencapai tiga tujuan, yaitu.

1. Meningkatkan kinerja pemerintah daerah.
2. Mendukung alokasi sumber daya dan pengambilan keputusan.
3. Melaksanakan akuntabilitas publik dan meningkatkan komunikasi lembaga.

2.1.4.3 Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah sebagai penanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi tanggung jawabnya. Laporan keuangan sektor publik

merupakan posisi keuangan yang berasal dari transaksi-transaksi organisasi sektor publik (V. Wiratna Sujarweni, 2015:88). Salah satu alat analisis untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah adalah dengan menganalisis rasio keuangan berdasarkan APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Halim & Kusufi, 2013: L-2).

Pengukuran aspek keuangan daerah dilakukan menggunakan rasio keuangan dan *value for money* (efisiensi, efektivitas dan ekonomis).

1. Analisis Rasio

Analisis rasio keuangan merupakan suatu metode untuk mengukur dan mengidentifikasi karakteristik keuangan berdasarkan laporan keuangan. analisis indikator kinerja keuangan dapat dilakukan dengan menghitung kinerja keuangan daerah dan kemampuan keuangan daerah kemudian membandingkan hasil yang dicapai pada suatu periode dengan periode lainnya.

a. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah merupakan rasio perbandingan antara pendapatan transfer yang diterima oleh pemerintah daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ketergantungan, maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat/provinsi. Adapun rasio ketergantungan keuangan daerah yang dirumuskan oleh Mahmudi (2016) adalah sebagai berikut.

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

b. Rasio Pertumbuhan

Menurut Halim & Kusufi (2013), rasio pertumbuhan merupakan rasio yang menunjukkan sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya yang bergantung pada kinerja pemerintah daerah dari satu periode ke periode berikutnya. Rasio pertumbuhan dirumuskan sebagai berikut.

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{PAD}_t - \text{PAD}_{t-1}}{\text{PAD}_{t-1}} \times 100\%$$

2. *Value for Money*

Value for money merupakan sebuah konsep penghargaan terhadap nilai uang. *Value for money* digunakan dalam pengukuran kinerja keuangan untuk mengukur ekonomi, efisiensi dan efektivitas kegiatan atau organisasi (Mahmudi, 2015).

a. Rasio Ekonomi

Rasio ekonomi diukur dengan membandingkan realisasi anggaran dengan anggaran biaya yang dikeluarkan. Menurut Mahsun (2014) rasio ekonomi dirumuskan sebagai berikut.

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Anggaran Biaya}} \times 100\%$$

kriteria penilaian dan kinerja ekonomi menurut Mahsun (2014) adalah sebagai berikut.

1. Apabila diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$), termasuk kriteria ekonomis.
2. Apabila diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$), termasuk kriteria ekonomis berimbang.
3. Apabila diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$), termasuk kriteria tidak ekonomis.

b. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan dengan realisasi pendapatan daerah yang dihasilkan. Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam hal pemungutan pendapatan tergolong efektif apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau kurang dari 100%. Semakin kecil efisiensi keuangan daerah maka semakin baik kinerja fiskal pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus menghitung secara cermat biaya pencapaian seluruh pendapatan untuk menentukan apakah kegiatan pemungutan pendapatan telah efektif. Adapun menurut Mahmudi (2016) merumuskan rasio efisiensi sebagai berikut.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian dan kinerja efisiensi menurut Mahsun (2014:187) adalah sebagai berikut.

1. Apabila diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$), termasuk kriteria tidak efisien.
2. Apabila diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$), termasuk kriteria efisien berimbang.
3. Apabila diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$), termasuk kriteria efisien.

c. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan target (anggaran) penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Mahmudi (2019:141) berpendapat bahwa efektivitas Pendapatan Asli Daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola penerimaan manfaat Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan target. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dirumuskan sebagai berikut.

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian dan kinerja efektivitas menurut Mahmudi (2019:141) adalah sebagai berikut.

1. Apabila diperoleh nilai kurang dari 75% ($x < 75\%$), termasuk kriteria tidak efektif.
2. Apabila diperoleh nilai 75%-89% ($x = 75\%-89\%$), termasuk kriteria kurang efektif.

3. Apabila diperoleh nilai 90%-99% ($x = 90\%-99\%$), termasuk kriteria cukup efektif.
4. Apabila diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$), termasuk kriteria efektif.
5. Apabila diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$), termasuk kriteria sangat efektif.

2.1.5 Kajian Empiris

Berikut merupakan penelitian-penelitian yang mendukung dalam penelitian ini.

1. Ningrum Pramudiati dan Anandita Zulia Putri (2022) melakukan penelitian dengan judul *The Influence of Local Government Characteristics on Performance Effectiveness According to the Accrual-Based Accounting System* memberikan hasil bahwa *the complexity of local government had a positive effect on the effectiveness of local government performance, while the level of leadership education and audit opinion did not influence the effectiveness of local government performance.*
2. Yulia Wijayanti dan Dhini Suryandari (2020) melakukan penelitian dengan judul *The Effect of Regional Characteristics, Leverage, Government Complexity, BPK Audit Findings and Opinions on Local Government Financial Performance* memberikan hasil penelitian bahwa *The result of this research for variables of regional expenditure and audit opinion have a positive effect, while regional size has a negative effect, the level of regional*

wealth, leverage, government complexity and audit findings do not affect on the financial performance of the local government.

3. Pancawati Hardiningsih, Indira Januarti, Ceacilia Srimindarti and Rachmawati Meita Oktaviani (2019) melakukan penelitian dengan judul *Does Characteristics of Regional Government and Complexity Affect on the Disclosure Regional Financial Statement?* memberikan hasil bahwa *regional wealth, government size, and the number of regional apparatus working units had a significant positive effects on the level of disclosure of Regional Government Financial Statements (RGFS). Whereas the level of dependency and the legislative had no effect on the level of disclosure of RGFS.*
4. Anisa Musdirohmah, Sunardi dan Yulian Sahri (2022) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Ukuran Legislatif, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah dan Tingkat Kekayaan Pemerintah Daerah terhadap Rasio Efektivitas Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumbangsel memberikan hasil bahwa secara parsial ukuran legislatif dan tingkat ketergantungan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap rasio efektivitas kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumbangsel. Sementara itu, tingkat kekayaan pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap rasio efektivitas kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumbangsel.
5. Parassela Pangestu Primadiva, Dini Rosdini dan Sri Mulyani (2021) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Tingkat Kekayaan dan Tingkat Ketergantungan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah memberikan

hasil bahwa tingkat kekayaan daerah dan tingkat ketergantungan pada pusat berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

6. Nuwun Priyono, Siti Arifa dan Eva Wulandari (2018) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Kompleksitas Pemerintah dan Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Kinerja Fiskal Kabupaten/Kota di Jawa Tengah memberikan hasil bahwa kekayaan daerah dan jumlah penduduk yang berpengaruh secara parsial terhadap kinerja fiskal. Sementara itu, secara simultan ukuran pemda, kekayaan daerah, tingkat ketergantungan, jumlah penduduk, jumlah SKPD dan Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh terhadap kinerja fiskal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah.
7. Yustina Hiola dan Ervina Harun (2021) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah di Provinsi Gorontalo memberikan hasil bahwa Ukuran pemerintah, Rasio Kemandirian Daerah, Ukuran Legislatif dan jumlah Temuan Audit berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Sementara itu, pendapatan transfer dan Jumlah OPD tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.
8. Taufik Dasmal, Yesi Mutia Basri dan Novita Indrawati (2020) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kekayaan Daerah, Belanja Daerah, *Intergovernmental Revenue*, Temuan Audit Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah memberikan hasil bahwa kekayaan daerah, *intergovernmental revenue*

berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau. Sementara itu, belanja daerah dan temuan audit tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau.

9. Muhamma Raihanul Alfi dan Vita Fitria Sari (2023) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Leverage, Jumlah Penduduk dan Umur Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Empiris pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Periode 2016-2020 memberikan hasil bahwa Leverage dan Umur Pemerintah Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan Jumlah Penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
10. Alya Clara Dewanti, Nelly Masnila dan Siska Aprianti (2022) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Ukuran Pemerintah dan Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah memberikan hasil bahwa Ukuran Pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sementara itu, Ukuran Legislatif berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
11. Dessy Ari Permatasari dan Sri Trisnaningsih (2022) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kemandirian, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah memberikan hasil bahwa kemandirian daerah, efektifitas pendapatan asli daerah dan belanja daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

12. Riky Setiawan, Magnaz Lestira O. dan Pupung Purnamasari (2020) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah, Belanja Daerah dan Hasil Opini Audit terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah memberikan hasil bahwa Kekayaan Daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Sementara itu, belanja daerah dan hasil opini tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
13. Keren Debora Kartika Sari Talumewo, George M.V. Kawung dan Steeva Y.L. Tumangkeng (2020) melakukan penelitian dengan judul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Manado memberikan hasil bahwa kemandirian, efektivitas dan efisiensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kota Manado baik secara parsial maupun secara simultan.
14. Rika Henda Safitri, Umi Kalsum dan Trie Sartika Pratiwi (2023) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan memberikan hasil bahwa tingkat kekayaan daerah dan belanja modal tidak mempunyai pengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Tingkat ketergantungan dan akuntabilitas memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
15. Inul Rofiq dan Fefri Indra Arza (2021) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Umur Pemerintah Daerah, Status

Pemerintah Daerah, Jumlah Penduduk, Jumlah SKPD, Belanja Pegawai dan Leverage terhadap Kemandirian Keuangan Daerah memberikan hasil bahwa Status Pemerintah, Jumlah Penduduk dan *Leverage* berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Sementara itu, Ukuran Pemerintah Daerah, Umur Pemerintah Daerah, Jumlah SKPD dan Belanja Pegawai berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

16. Megawati Sukarni Putri dan Vita Fitria Sari (2020) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kekayaan Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah: Pengujian Kompleksitas Pemerintah sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatra Barat tahun 2013-2017) memberikan hasil bahwa Kekayaan Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap Kinerja Penyelenggaraan Kinerja Pemerintah Daerah. Kompleksitas Pemerintah tidak memoderasi hubungan antara Kekayaan Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
17. Maulana Ramadhan, Memen Kustiawan dan Fitriana (2022) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pengelolaan Belanja Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah memberikan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah, pengelolaan belanja daerah dan kemandirian keuangan daerah berpengaruh baik secara simultan maupun parsial terhadap kinerja keuangan daerah.

18. Nur Shafira Anynda dan Suwardi Bambang Hermanto (2020) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah dan Pengelolaan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah memberikan hasil bahwa kemandirian daerah, efektifitas pendapatan asli daerah dan pengelolaan belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah.
19. Muhtar (2023) melakukan penelitian dengan judul Determinan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah di Indonesia: Studi Empiris Peranan Kemandirian Daerah dan Kekayaan Daerah memberikan hasil bahwa kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Sementara itu, kekayaan daerah tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan.
20. Mahardika Burhan, Kartini dan Darwis Said (2022) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kemandirian Keuangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi memberikan hasil bahwa kemandirian keuangan dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi memoderasi pengaruh kemandirian keuangan terhadap kinerja keuangan daerah. Pertumbuhan ekonomi tidak dapat memoderasi pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan daerah.

2.1.6 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tabel 2.2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Penulis

No	Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Ningrum Pramudiati and Anandita Zulia Putri (2022) <i>The Influence of Local Government Characteristics on Performance Effectiveness According to the Accrual-Based Accounting System</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Local Government Characteristics (the complecity)</i> • <i>Performance Effectiveness According</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Local Government Characteristics (the level of leadership education, audit opinion)</i> • <i>Using multiple linear regression Analysis</i> 	<i>The results showed that the complexity of local government had a positive effect on the effectiveness of local government performance, while the level of leadership education and audit opinion did not influence the effectiveness of local government performance.</i>	ICESRE 2021 4 th International Conference on Education and Social Science Research (ICESRE) Volume 2022 DOI 10.18502/kss.v7i14.12029
2	Yulia Wijayanti and Dhini Suryandari (2020) <i>The Effect of Regional Characteristics, Leverage, Government Complexity, BPK Audit Findings and Opinions on Local Government Financial Performance</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>The effect of regional characteristics(Level of regional wealth)</i> • <i>Government Complexity</i> • <i>Local Government financial performance</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>The effect of regional characteristics (Regional Size)</i> • <i>The effect of regional characteristics (Regional Expenditure)</i> • <i>Leverage</i> • <i>BPK Audit Findings</i> • <i>BPK Audit Opinion</i> • <i>Using multiple linear regression</i> 	<i>The result of this research for variables of regional expenditure and audit opinion have a positive effect, while regional size has a negative effect, the level of regional wealth, leverage, government complexity and audit findings do not affect on the financial performance of the local government.</i>	<i>Accounting Analysis Journal</i> 9 (1) (2020) 30-37 DOI 10.15294/anj.v9i1.22483 p-ISSN 2252-6765 e-ISSN 2502-6216
3	Pancawati Hardiningsih, Indira Januari, Ceacilia Srimindarti and Rachmawati Meita Oktaviani (2019) <i>Does Characteristics of</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Characteristics of Regional (regional wealth)</i> • <i>Complexity</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Characteristics of Regional (government size, level of dependency)</i> • <i>Disclosure regional financial statement</i> • <i>Using myltiple regression analysis</i> 	<i>These results provide that regional wealth, government size, and the number of regional apparatus working units had a significant positive effects on the level of disclosure of Regional Government Financial Statements (RGFS). Whereas the</i>	Jurnal Akuntansi dan Auiting Indonesia 23 (2) December 2019 www.jurnal.uui.ac.id/index.php/jaai

No	Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>Regional Government and Complexity Affect on the Disclosure Regional Financial Statement?</i>			<i>level of dependency and the legislative had no effect on the level of disclosure of RGFS.</i>	
4	Anisa Musdirohmah, Sunardi dan Yulian Sahri (2022) Pengaruh Ukuran Legislatif, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah dan Tingkat Kekayaan Pemerintah Daerah Terhadap Rasio Efektivitas Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumbangsel.	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Kekayaan Pemerintah Daerah • Ukuran Legislatif • Rasio Efektivitas Kinerja Keuangan Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah • Menggunakan Analisis Regresi Berganda 	Secara parsial menunjukkan bahwa Ukuran Legislatif dan Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap Rasio Efektivitas Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumbangsel. Sementara itu, Tingkat Kekayaan Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan terhadap Rasio Efektivitas Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumbangsel.	Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 11, No. 2, September 2022 P-ISSN : 2503-4413 E-ISSN : 2654-5837, Hal 566-576 Universitas Muhammadiyah Palembang
5	Parassela Pangestu Primadiva, Dini Rosdini dan Sri Mulyani (2021) Pengaruh Tingkat Kekayaan dan Tingkat Ketergantungan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Kekayaan • Kinerja Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Ketergantungan Daerah • Menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda 	Tingkat kekayaan daerah dan tingkat ketergantungan pada pusat berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah	Jurnal Paradigma Ekonomika Vol.16. No.2, April – Juni 2021 ISSN: 2085-1960 (print); 2684 -7868 (online). Prodi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran

No	Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	Nuwun Priyono, Siti Arifah dan Eva Wulandari (2018) Pengaruh karakteristik Pemerintah Daerah, Kompleksitas Pemerintahan dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Fiskal Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> • Karakteristik Pemerintah Daerah (Tingkat Kekayaan Daerah) • Kompleksitas Pemerintah Daerah • Kemandirian Keuangan Daerah • Kinerja Fiskal 	<ul style="list-style-type: none"> • Karakteristik Pemerintah Daerah (Tingkat ketergantungan) • Menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda 	Kekayaan Daerah dan Jumlah Penduduk yang secara parsial berpengaruh terhadap kinerja fiskal. Secara simultan Ukuran Pemda, Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan, Jumlah Penduduk, Jumlah SKPD dan Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Fiskal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah.	Jurnal MONEX vol. 7 No. 2 Juni 2018 p- ISSN:2089-5321 e- ISSN:2549-5046
7	Yustina Hiola dan Ervina Harun (2021). Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Gorontalo	<ul style="list-style-type: none"> • Karakteristik Pemda (Rasio Kemandirian Daerah) • Kompleksitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Karakteristik Pemda (Ukuran Pemerintah, Pendapatan Transfer) • Temuan Audit • Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah • Menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda 	Ukuran pemerintah, Rasio Kemandirian Daerah, Ukuran Legislatif dan jumlah Temuan Audit berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Sementara itu, pendapatan transfer dan Jumlah OPD tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.	JSAP: Jurnal Syariah and Accounting Public Vol. 4, No. 2, Desember 2021. ISSN: 2622-3538 DOI: 10.21214/jsa p.4.2.89-101.2021. Available Online at https://journal.umgo.ac.id/index.php/JSAP/index .
8	Taufik Dasmal, Yesi Mutia Basri dan Novita Indrawati (2020). Pengaruh Kekayaan Daerah, Belanja Daerah, <i>Intergovernmental Revenue</i> , Temuan Audit Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Kekayaan Daerah • Kinerja Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Daerah • <i>Intergovernmental Revenue</i> • Temuan Audit • Menggunakan Analisis Regresi Berganda 	Kekayaan Daerah, <i>Intergovernmental Revenue</i> berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau. Sementara itu, Belanja Daerah dan Temuan Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	Jurnal Al Iqtishad, Edisi 16, Vol. 2, Tahun 2020. Universitas Riau P-ISSN : 0216-2547 E-ISSN : 2656-8489

No	Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau.	
9	Muhammad Rauhanul Alfi dan Vita Fitria Sari (2023) Pengaruh <i>Leverage</i> , Jumlah Penduduk dan Umur Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Empiris pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Periode 2016-2020.	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Leverage</i> • Umur Pemerintah • Menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda 	Leverage Berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Jumlah Penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Umur Pemerintah Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol 5, No. 3, Agustus 2023, Hal 1098-1114 Universitas Negeri Padang ISSN : 2656-3649 http://jea.ppi.unp.ac.id/index.php/jea/index
10	Alya Clara Dewanti, Nelly Manila dan Siska Aprianti (2022). Pengaruh Ukuran Pemerintah dan Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • Ukuran Legislatif (Kompleksitas Pemerintah) • Menggunakan Regresi Data Panel 	<ul style="list-style-type: none"> • Ukuran Pemerintah 	Ukuran Pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sedangkan Ukuran Legislatif berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	Jurnal Akuntanika, Vol. 8, No.2, Juli-Desember 2022. ISSN 2407-1072
11	Dessy Ari Permatasari dan Sri Trisnaningsih (2022) Pengaruh Kemandirian, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Kemandirian • Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (Rasio pengukuran kinerja keuangan daerah) • Kinerja Keuangan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Daerah • Menggunakan Analisis Regresi Linear Sederhana 	Kemandirian Daerah, Efektifitas Pendapatan Daerah serta Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah.	Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22 (3), Oktober 2022, 1573-1582 ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (Print) DOI 10.33087/jiu.bj.v22i3.2581

No	Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12	Riky Setiawan, Magnaz Lestira O. dan Pupung Purnamasari (2020) Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah, Belanja Daerah dan Hasil Opini Audit terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Kekayaan Daerah • Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Daerah • Hasil Opini Audit • Menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda 	Kekayaan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Belanja Daerah dan Hasil Opini Audit tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan kabupaten/kota di Jawa Barat.	SPeSIA Seminar Penelitian Sivitas Akademika Unisba Vol. 6, No. 1, Prosiding Akuntansi (Februari, 2020). Universitas Islam Bandung. ISSN: 2460-6561
13	Keren Debora Kartika Sari Talumewo, George M.V. Kawung dan Steeva Y.L. Tumangkeng (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Manado	<ul style="list-style-type: none"> • Kemandirian Keuangan Daerah • Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Efektivitas • Efisiensi • Menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda 	Kemandirian, Efektivitas dan Efisiensi berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Manado baik secara parsial maupun secara simultan.	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol. 20 No. 02 Tahun 2020 Universitas Sam Eatulangi Manado
14	Rika Henda Safitri, Umi Kalsum dan Trie Sartika Pratiwi (2023) Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan	<ul style="list-style-type: none"> • Karakteristik Pemerintah Daerah (Tingkat Kekayaan Daerah) • Kinerja Pemerintah Daerah Menggunakan Analisis Regresi Data Panel 	<ul style="list-style-type: none"> • Karakteristik Pemerintah Daerah (Ukuran Daerah, Tingkat Ketergantungan dan Belanja Modal) • Akuntabilitas 	Tingkat Kekayaan Daerah dan Belanja Modal tidak mempunyai pengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Tingkat Ketergantungan dan Akuntabilitas memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di	Riset & Jurnal Akuntansi Vol. 7, No. 1, Januari 2023 e-ISSN : 2548-9224 p-ISSN : 2548-7507 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1267

No	Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Provinsi Sumatera Selatan.	
15	Inul Rofiq dan Fefri Indra Arza (2021) Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Umur Pemerintah Daerah, Status Pemerintah Daerah, Jumlah Penduduk, Jumlah SKPD, Belanja Pegawai dan <i>Leverage</i> Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah SKPD • Jumlah Penduduk • Kemandirian Keuangan Daerah (Variabel Dependen) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ukuran Pemerintah Daerah • Umur Pemerintah Daerah • Status Pemerintah Daerah • Jumlah Penduduk • Belanja Pegawai • <i>Leverage</i> • Menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda 	Status Pemerintah, Jumlah Penduduk dan <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Sementara itu, Ukuran Pemerintah Daerah, Umur Pemerintah Daerah, Jumlah SKPD dan Belanja Pegawai berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.	Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA) Vol. 3, No. 3, Agustus 2021, Hal 705-719 Universitas Negeri Padang e-ISSN : 2656-3649 (Online) https://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/index
16	Megawati Sukarni Putri dan Vita Fitria Sari (2020) Pengaruh Kekayaan Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah: Pengujian Kompleksitas Pemerintah sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatra Barat tahun 2013-2017)	<ul style="list-style-type: none"> • Kekayaan Daerah • Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah • Kompleksitas Pemerintah (Variabel Moderasi) 	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal • Menggunakan Analisis Regresi Moderasi 	Kekayaan Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap Kinerja Penyelenggaraan Kinerja Pemerintah Daerah. Kompleksitas Pemerintah tidak memoderasi hubungan antara Kekayaan Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.	Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol. 2, No. 3, Seri B, Agustus 2020, Hal 3085-3106 ISSN: 2656-3649 (Online) https://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/26
17	Maulana Ramadhan, Memen	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah (Tingkat Kekayaan Daerah) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Belanja Daerah 	Pendapatan Asli Daerah, Pengelolaan Belanja Daerah dan Kemandirian Keuangan	<i>Jurnal Syntax Transformati on</i> Vol. 2,

No	Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kustiawan dan Fitriana (2022) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pengelolaan Belanja Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Kemandirian Keuangan Daerah • Kinerja Keuangan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan Analisis Regresi Berganda 	Daerah berpengaruh baik secara simultan maupun parsial terhadap Kinerja Keuangan Daerah.	No. 6, Juni 2022 P-ISSN : 2721-3854 E-ISSN : 2721-2769 Universitas Sangga Buana YPKP, Jawa Barat, Indonesia
18	Nur Shafira Anynda dan Suwandi Bambang Hermanto (2020) Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah dan Pengelolaan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio Kemandirian Daerah • Kinerja Keuangan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Efektifitas Pendapatan Asli Daerah • Pengelolaan Belanja Daerah • Menggunakan Model Regresi Linear Berganda 	Rasio Kemandirian Daerah, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah dan Pengelolaan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah.	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), Vol. 9 No 10 (2020) e-ISSN 2460-0585
19	Muhtar (2023) Determinan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah di Indonesia: Studi Empiris Peranan Kemandirian Daerah dan Kekayaan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Kemandirian Daerah • Kekayaan Daerah • Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda 	Kemandirian Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Sementara itu, Kekayaan Daerah tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan.	Jurnal Manajemen Dewantara Vol 7 No 2 (2023): 31-41 Universitas Sebelas Maret
20	Mahardika Burhan, Kartini, dan Darwis Said (2022) Pengaruh Kemandirian Keuangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> • Kemandirian Keuangan • Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah • Menggunakan Analisis Regresi Data Panel 	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal • Pertumbuhan Ekonomi (Variabel Moderasi) 	Kemandirian Keuangan dan Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Pertumbuhan Ekonomi memoderasi pengaruh Kemandirian Keuangan terhadap Kinerja	Al-Buhuts e-Journal Vol. 18 No. 2, Desember 2022 E-ISSN : 2442-823X P-ISSN : 1907-0977

No	Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi			Keuangan Daerah. Pertumbuhan Ekonomi tidak dapat memoderasi pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah.	Universitas Hasanuddin Makassar
Luthfiah Rohadatul Aisy (203403163) Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah, Kompleksitas Pemerintah Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Sensus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022)					

2.2 Kerangka Pemikiran

Pemerintah daerah selaku pengguna anggaran wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan sumber informasi yang digunakan oleh pemerintah dalam mengambil kebijakan dan keputusan serta sumber informasi bagi pihak luar seperti investor, bank maupun perusahaan. Oleh karena itu, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus memberikan informasi yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan bagi semua pihak. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut harus memenuhi karakteristik kualitatif yaitu relevan, andal dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Terdapat teori yang mendukung dalam penelitian ini yaitu teori keagenan (*Teori Agency*). Menurut Sophi Dezalinda & Afriyenti (2023) Teori keagenan

merupakan teori yang dikembangkan dari teori yang mempelajari tentang metode kesepakatan oleh dua pihak yang telah menyepakati kontrak kerjasama. Dalam perjanjian tersebut, prinsipal (investor) memberikan wewenang kepada agen (manajemen) yang mengelola suatu organisasi/perusahaan.

Teori keagenan pada pemerintah menjadi suatu konsep yang penting karena organisasi pemerintah selalu berhubungan dengan pendelegasian wewenang. Hal ini dimulai sejak diberlakukannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Teori keagenan dalam pemerintahan dapat dilihat dari hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Teori keagenan dapat dilihat dari hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Pemerintah daerah sebagai agen menerima kepercayaan dari masyarakat selaku prinsipal untuk mengelola sumber kekayaan daerah dengan semestinya. Rakyat selaku prinsipal berhak untuk mengetahui apa yang telah dikerjakan oleh pemerintah daerah sebagai agen dalam hal ini kinerja keuangan pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah yang bertindak sebagai agen memiliki tanggung jawab untuk mengelola keuangan daerah bekerja untuk kepentingan masyarakat selaku prinsipal.

Pengelolaan keuangan yang baik tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Damar et al. (2020) memberikan hasil bahwa kekayaan daerah, *intergovernmental revenue* berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah sedangkan belanja daerah dan temuan audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian Pramudiati & Zulia Putri (2022) memberikan hasil bahwa *the complexity of local government had a positive effect on the*

effectiveness of local government performance, while the level of leadership education and audit opinion did not influence the effectiveness of local government performance. Penelitian Muhtar (2023) memberikan hasil bahwa kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah sedangkan kekayaan daerah tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Dari beberapa faktor diatas, penulis meneliti tiga faktor yaitu tingkat kekayaan daerah, kompleksitas pemerintah daerah dan kemandirian keuangan daerah yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Tingkat kekayaan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh daerah (Safitri et al., 2022). Dalam penelitian ini, tingkat kekayaan daerah diukur menggunakan Pendapatan Asli Daerah. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah dalam menjalankan program dan kegiatan adalah melayani masyarakat dengan terus menerus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dibiayai dengan Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan modal dasar bagi setiap daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan sekaligus bukti dukungan masyarakat terhadap pemerintah dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (Nurjaya, 2023). Pemerintah daerah dituntut agar meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan memaksimalkan potensi-potensi

dari sumber daya yang dimiliki oleh daerah untuk memenuhi kebutuhan daerahnya yang dialokasikan kepada pembangunan daerah sebagai wujud dari pelaksanaan otonomi daerah. Pembangunan daerah yang dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan akan mendorong pihak swasta atau investor untuk melakukan investasi yang tinggi, dengan peningkatan investasi akan meningkat pula jumlah PAD daerah tersebut. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah mencerminkan kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik karena pemerintah daerah akan lebih leluasa dalam memanfaatkan kekayaan asli daerahnya untuk melakukan belanja daerah yang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tingkat Kekayaan Daerah diukur dengan membagi Pendapatan Asli Daerah dengan total pendapatan daerah.

Penelitian terdahulu yang sejalan dengan pengaruh tingkat kekayaan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah adalah penelitian Damar et al. (2020) yang mengatakan bahwa kekayaan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, Setiawan et al. (2020) mengatakan bahwa kekayaan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah. Penelitian Primadiva et al. (2021) mengemukakan bahwa tingkat kekayaan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Adapun menurut Muhtar (2023) mengatakan bahwa tingkat kekayaan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kompleksitas pemerintahan daerah dapat diartikan sebagai situasi yang mempengaruhi cara pemerintah daerah beroperasi karena adanya berbagai faktor dan karakteristik yang beragam pada daerah tersebut (Andesti & Agustin, 2022). Dalam penelitian ini, kompleksitas diukur dengan Jumlah SKPD, Ukuran Legislatif

dan Jumlah Penduduk. Menurut M. S. Putri & Sari (2020) kompleksitas menggunakan Jumlah SKPD menggambarkan jumlah urusan yang menjadi prioritas pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja keuangan daerahnya. Semakin banyak urusan yang diprioritaskan, akan semakin kompleks pemerintah tersebut serta meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah (Khasanah & Rahardjo, 2014). SKPD merupakan instansi yang bertanggungjawab dalam penggunaan APBD kepada masyarakat. Semakin banyaknya jumlah SKPD diharapkan pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan publik yang baik sehingga mendorong kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik juga. Kompleksitas pemerintah daerah selanjutnya diukur menggunakan indikator ukuran legislatif. Ukuran legislatif digunakan untuk meningkatkan pengawasan terhadap pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya sehingga akan meningkat juga kinerja keuangan daerahnya (Dewanti et al., 2022). Selanjutnya kompleksitas dengan Jumlah Penduduk. Jumlah penduduk merupakan faktor lingkungan yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Jumlah penduduk mendorong adanya peningkatan ekonomi pada suatu daerah. Peningkatan perekonomian tersebut mendorong pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah sehingga meningkat pula kinerja keuangan pemerintah daerah. Akan tetapi, kompleksitas secara umum tidak dapat dikatakan mempengaruhi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini sebagai mana menurut Saputro & Mahmud (2014) mengemukakan bahwa semakin tinggi kompleksitas pemerintah daerah, maka dibutuhkan juga pengungkapan pemerintah yang lebih besar untuk membantu pembaca laporan keuangan memahami kompleksitas kegiatan yang dilakukan oleh

pemerintah daerah. Dengan demikian, kompleksitas pemerintah daerah yang semakin tinggi akan memiliki risiko lebih besar terhadap tindak kecurangan pada pemerintah daerah sehingga akan mempengaruhi kinerja pemerintah.

Penelitian terdahulu yang sejalan dengan pengaruh kompleksitas pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah adalah penelitian Wijayanti & Suryandari (2020) dan Fitrianiingsih (2023) mengatakan bahwa kompleksitas pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sementara itu, penelitian Pramudiati & Zulia Putri (2022) mengatakan bahwa kompleksitas pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap efektivitas kinerja pemerintah daerah.

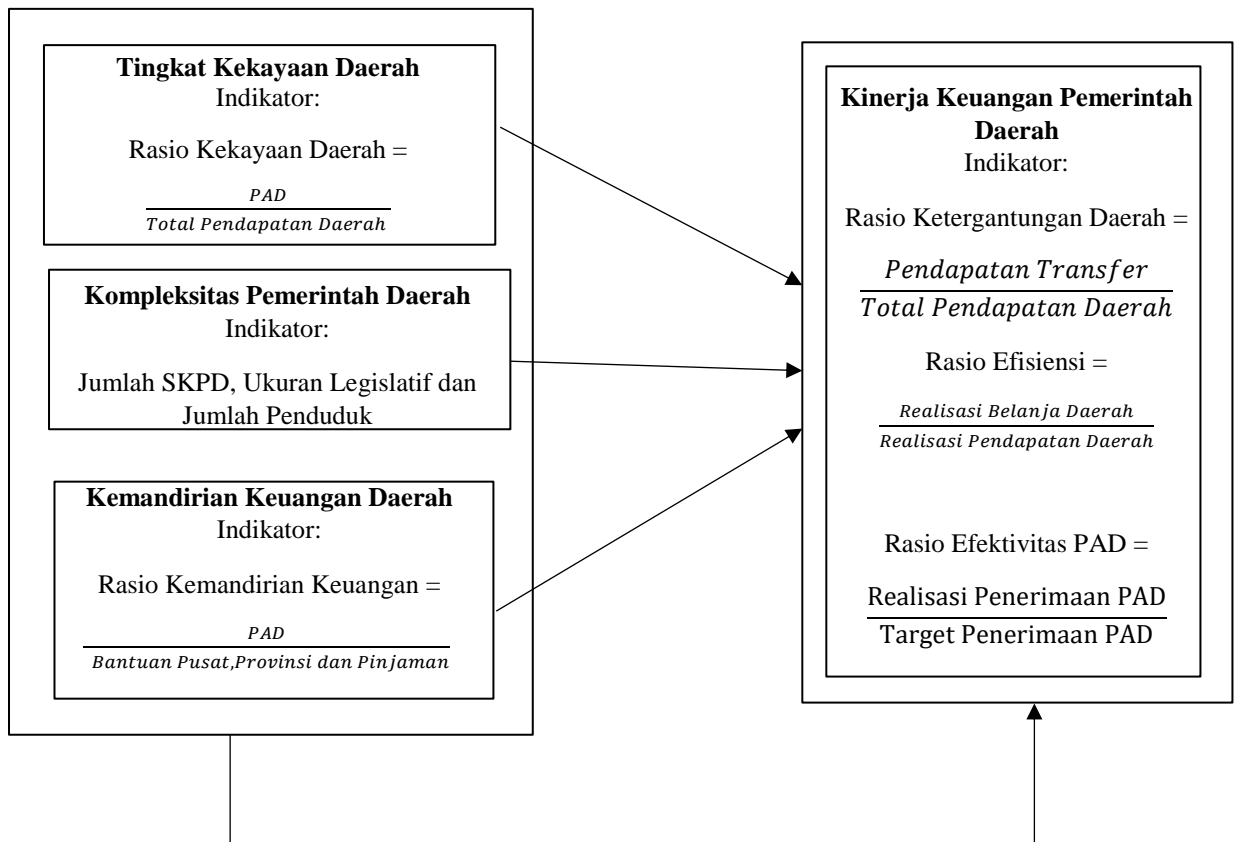
Kemandirian Keuangan Daerah mencerminkan sejauh mana suatu daerah bergantung pada Pendapatan Transfer sebagai sumber pendanaan dari luar (Permatasari & Trisnaniingsih, 2022). Kemandirian daerah mendorong pemerintah daerah dalam menjalankan urusan daerah baik dalam urusan pemerintahan maupun urusan pembangunan dengan mengandalkan keuangan daerah masing-masing berdasarkan asas otonomi daerah. Kemandirian keuangan daerah menggambarkan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan daerah dengan tidak bergantung pada bantuan atau pinjaman dari pemerintah pusat.

Semakin besar pendapatan transfer yang diterima oleh pemerintah daerah harus menjadi perhatian bagi pemerintah pusat untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendapatan transfer. Dengan pengawasan yang tinggi maka pemerintah daerah dapat termotivasi untuk menghasilkan kinerja keuangan pemerintah yang baik. Terlaksananya kemandirian keuangan daerah, pemerintah

daerah akan mampu dalam mendanai sendiri pembangunan daerah dan meningkatkan pelayanan masyarakat. Kemandirian keuangan yang berhasil dilaksanakan oleh pemerintah daerah mencerminkan kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik. Dalam penelitian ini kemandirian keuangan daerah diukur menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah dengan membagi total pendapatan asli daerah dengan total transfer pusat, provinsi dan pinjaman.

Penelitian terdahulu yang sejalan dengan Permatasari & Trisnaningsih (2022) mengatakan bahwa kemandirian berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah, Talumewo et al. (2020) mengatakan bahwa kemandirian berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan penelitian yang dilakukan Muhtar (2023) mengemukakan bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Berikut disajikan gambar kerangka pemikiran dalam penelitian ini yang menjelaskan keterkaitan Tingkat Kekayaan Daerah, Kompleksitas Pemerintah Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut.

1. Tingkat Kekayaan Daerah, Kompleksitas Pemerintah Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh secara bersama-sama terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Tingkat Kekayaan Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Kompleksitas Pemerintah Daerah berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
4. Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.